



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 30 Juni 2021

Halaman: 1

76

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja

Krisnadi Setyawan Bicara Model Pendidikan di Masa Pandemi

Peserta Didik di Asrama, Kerja Sama dengan Asosiasi Perhotelan

Situasi pandemi masih gawat. Masifnya penularan Covid-19 karena tingginya interaksi sosial juga terjadi pada peserta didik. Baik anak-anak maupun dewasa. Terbatasnya pelayanan kesehatan (yankes) menjadi persoalan besar. Saat terjadi tingkat penularan tinggi.

POLA penularan Covid-19 di Kota Jogja sudah terjadi secara lokal. Antarkomunitas. Sulit melacak sumber penularannya. Satu-satunya cara mengurangi dengan membatasi pergerakan sosial.

Peserta didik berisiko tinggi terpapar Covid-19. Ini mengingat daya tahan fisik dan karakter anak. Masih suka bermain maupun bercanda. Hal ini dikhawatirkan mengabaikan protokol kesehatan (prokes). Karena itu, perlu perlindungan maksimal bagi mereka. Tanpa harus mengorbankan interaksi sosial yang sangat penting bagi perkembangan jiwa peserta didik.

► Baca Peserta..., Hal 7

LINDUNGSI SISWA: Krisnadi Setyawan mengusulkan langkah yang harus ditempuh Pemkot Jogja.

KUNJUNGAN LAPANGAN:
Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kota Jogja mengunjungi SMPN 15 Jogja menyerap aspirasi dalam rangka pembelajaran di masa pandemi.

1.
2.
3.
4.
5.

Yogyakarta,
Kepala

Peserta Didik di Asrama, Kerja Sama dengan Asosiasi Perhotelan

Sambungan dari hal 1

Selama pandemi fasilitas dan sistem pendidikan tatap muka berisiko menjadi tempat penularan. Kapasitas ruang kelas yang terbatas, disain ruangan tertutup dan ber-AC rawan meningkatkan penyebaran virus.

Di masa mendatang fasilitas pendidikan harus diarahkan mencegah penyebaran virus. Memaksimalkan perlindungan bagi peserta didik. Kurikulum pendidikan prapandemi tidak cocok diterapkan secara online atau daring. Terutama pelajaran matematika dan ilmu eksakta. Itu terbukti dengan rendahnya nilai assesmen standart pendidikan daerah atau ASPD.

Beban operasional sekolah, terutama sekolah swasta menjadi tanggungan peserta didik. Berbeda dengan sekolah negeri. Mendapatkan dukungan APBD/APBN. Peserta didik bebas biaya pendidikan. Meski demikian, masih ada saja sekolah negeri menarik pungutan. Dalihnya penambahan fasilitas secara sukarela melalui komite sekolah.

Kedadaan ini semakin mem-beratkan kehidupan masyarakat tidak mampu yang terpuruk oleh pandemi. Tidak masuk sekolah *kok* tetap harus bayar. Begitulah keluhan sebagian masyarakat kita.

Pendidikan online menambah belanja telekomunikasi berupa pengadaan pulsa dan gadget. Orang tua tak sanggup mendampingi belajar anaknya secara optimal. Baik karena keterbatasan waktu maupun pengetahuan terhadap materi pelajaran. Banyak orang tua lebih suka sekolah dibuka kembali. Anak-anak bisa belajar di sekolah. Kemudian orang tua kembali bekerja.

Peran pemerintah daerah menjadi vital selama pandemi. Harus membatasi pendidikan tatap muka sesuai tinjauan epidemiologi. Juga wajib menyiapkan sarana dan prasarana dukungan pendidikan online.

Dalam rapat kerja Komisi D DPRD Kota Jogja dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, saya menyarankan beberapa hal. Di antaranya, bantuan operasional sekolah

(BOS) bisa dioptimalkan. BOS dapat dipakai membantu penyediaan kuota internet dan gadget siswa SD serta SMP. Selain itu, membuat software/aplikasi pendidikan. Tujuannya agar lebih mudah diterapkan secara daring. Termasuk sistem absensi dan penilaian. Pemerintah Kota Jogja berpengalaman karena sudah melaksanakan program *Jogja Smart Service*.

Menyiasati agar peserta didik dapat merasakan pengalaman belajar tatap muka, saya mengusulkan model *boarding school* atau asrama. Menyelenggarakan pendidikan tatap muka dengan sistem asrama dalam jangka waktu tertentu. Ini demi memberikan kesempatan peserta didik bertemu dan berkenalan dengan kawan satu angkatan secara langsung di lingkungan yang terkendali dan higienis.

Pendidikan tatap muka model asrama bertujuan menjaga psikologis peserta didik. Tetap merasakan pendidikan komunal dan beragam. Selain itu, mata pelajaran yang sulit diterapkan secara online bisa disampaikan

secara langsung kepada peserta didik.

Secara teknis, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi perhotelan yang sudah menerapkan protokol kesehatan berbasis *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan) dan *environment sustainability* (kelestarian lingkungan). Misalnya, satu angkatan sebuah sekolah bisa menginap dan belajar selama sebulan dalam satu tahun.

Saat masuk dan selesai pendidikan di asrama bisa dilakukan *test screening* dengan rapid antigen atau swab PCR. Penyelenggara maupun peserta didik tetap aman dan sehat. Langkah ini menghemat biaya *testing* sekaligus memudahkan antisipasi bila tetap terjadi penularan di luar dugaan.

Dengan demikian selama satu tahun ajaran bisa dilaksanakan dengan 11 bulan online dan satu bulan tatap muka di asrama. Penyelenggara pendidikan dan peserta didik pulang ke rumah tetap sehat. Bisa terpan-tau kondisinya. (kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005